

## LAPORAN

### HASIL ANALISIS CAPAIAN PEMBELAJARAN, RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS), RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP), DAN KISI-KISI SOAL MATA KULIAH TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP



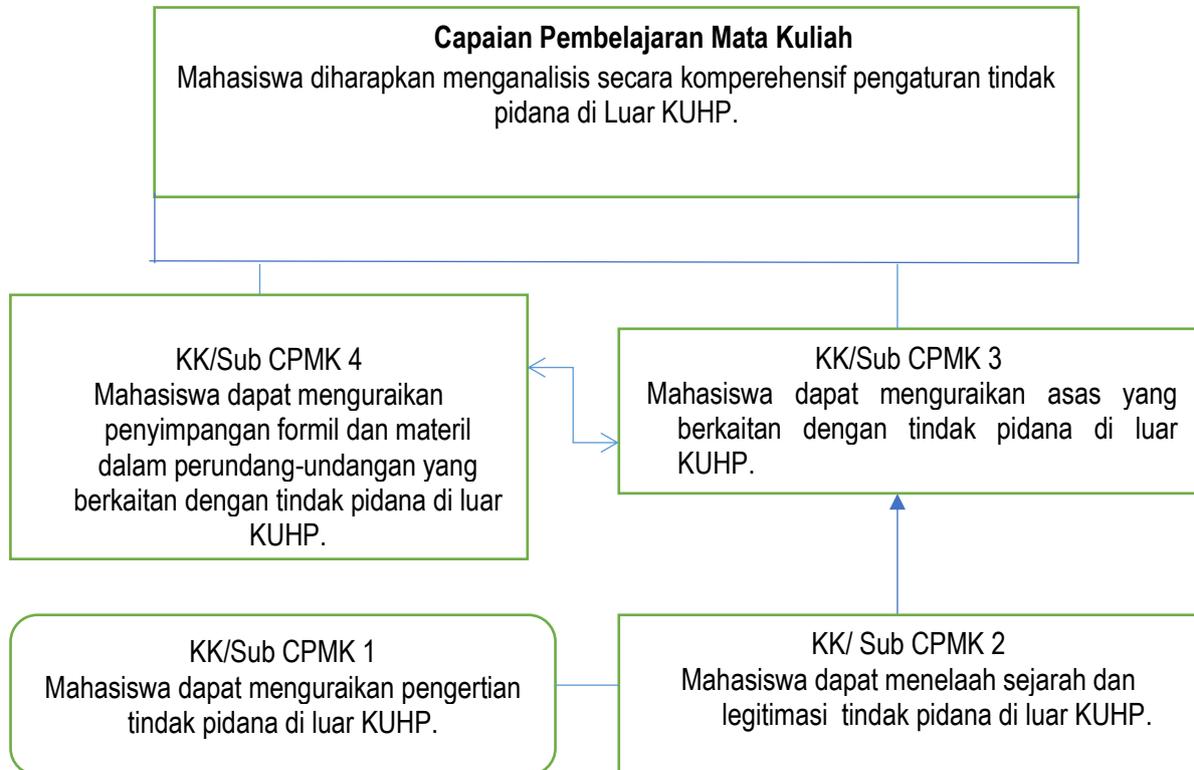
oleh

**Orin Gusta Andini, S.H., M.H**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2021**

## Analisis Capaian Pembelajaran

### Peta Analisis Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tindak Pidana di Luar KUHP, 2 SKS, Semester VI



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum/S-1 Ilmu Hukum
Mata Kuliah/Bobot	: Tindak pidana di luar KUHP/2 SKS
Kode Mata Kuliah	: 08015265
Mata Kuliah Prasyarat	: Telah mengikuti mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
SKS	: 2 (dua) SKS
Dosen Pengampu	: Orin Gusta Andini, S.H.,M.H

### Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Tindak Pidana di Luar KUHP termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan zaman.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Mahasiswa diharapkan menganalisis secara komprehensif pengaturan tindak pidana di Luar KUHP.

### Kemampuan Khusus (KK) atau Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa dapat menguraikan pengertian tindak pidana di luar KUHP.
2. Mahasiswa dapat memahami latar belakang dan legitimasi tindak pidana di Luar KUHP.
3. Mahasiswa dapat menguraikan asas berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP.
4. Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP.

### Aspek Sikap :

1. Mampu bersikap kritis dalam menghadapi segala adanya tindak pidana di luar KUHP.
2. Mampu membantu pencegahan perbuatan tindak pidana di luar KUHP dari kesadara diri sendiri, orang terdekat, serta lingkungan.
3. Mampu membangun budaya santun dan taat hukum secara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mampu menjadi "*agent of change*" dalam penanggulangan berbagai tindak pidana.

### Aspek Keterampilan Umum:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kejahatan korporasi sesuai keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

#### **Aspek Keterampilan Khusus:**

1. Mahasiswa dapat menguraikan pengertian tindak pidana di luar KUHP.
2. Mahasiswa dapat memahami latar belakang dan legitimasi tindak pidana di Luar KUHP.
3. Mahasiswa dapat menguraikan asas berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP.
4. Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP.

#### **Aspek Pengetahuan**

Setelah selesai mengikuti mata kuliah Tindak Pidana Di Luar KUHP, diharapkan mahasiswa semester VI dapat memahami tentang tindak pidana di luar KUHP secara mendalam sehingga dapat menumbuhkan karakter diri yang anti di Luar KUHP dan kritis terhadap masalah kekinian yang berkaitan dengan tindak pidana di Luar KUHP.

#### **PIP Unmul yang diintegrasikan :**

- Mampu menelaah permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis di Kalimantan Timur.

#### **Referensi :**

1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta
2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers: Jakarta
3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
 Tgl. Terbit : ...  
 No. Revisi : ...  
 Hal : 5/66

Perte muan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Metode/Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Refe-Rensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
1, 2,3	Mampu menguraikan pengertian tindak pidana di luar kuhp.	Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan istilah dan pengertian tindak pidana. 2. Menjelaskan subjek hukum tindak pidana 3. Menjelaskan pengertian tindak pidana di luar KUHP menurut para ahli. 4. Mendiferensiasikan jenis-jenis tindak pidana. 5. Menguraikan sistematika KUHP. 6. Memahami kualifikasi kejahatan dan pelanggaran	1. Pengertian, terminology tindak pidana, delik, <i>strafbaarfeit</i> . 2. Sejarah KUHP/ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 3. Pengertian dan istilah tindak pidana di luar KUHP 4. Jenis-jenis delik : Formil. Materil, Dolus, Culpa, Komsis, Omisi, Aduan, Biasa, Berurut-Turut, Berkualifikasi. 5. Sistematika KUHP : - Buku I : Asas Umum	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi.	Mahasiswa mendengarkan penyimak penjelasan materi, mendiskusikan, bertanya dan Membuat kesimpulan dari materi yang disajikan.	Non Tes (Keaktifan dalam diskusi) dan Tes Tertulis pada pertemuan kedua.	- Mampu menjelaskan dengan tepat: 1. Pengertian, terminology tindak pidana, delik, <i>strafbaarfeit</i> . 2. Sejarah KUHP/ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. 3. Pengertian dan istilah tindak pidana di luar KUHP 4. Jenis-jenis delik : Formil. Materil, Dolus, Culpa, Komisi, Omisi,	10%	Buku 1 dan 2, 3



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	6/66

		<p>7. Menelaah perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan tindak pidana di dalam KUHP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku II: Kejahatan</li> <li>- Buku III : Pelanggaran</li> </ul> <p>6. Kualifikasi kejahatan/ <i>recht delicten</i> dalam Buku II dan pelanggaran/ <i>wet delicten</i> dalam Buku III</p> <p>7. Perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan di dalam KUHP</p>				<p>Aduan, Biasa, Berurut-Turut, Berkualifikasi.</p> <p>5. Sistematika KUHP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku I : Asas Umum</li> <li>- Buku II: Kejahatan</li> <li>- Buku III : Pelanggaran</li> </ul> <p>6. Kualifikasi kejahatan/ <i>recht delicten</i> dalam Buku II dan pelanggaran/ <i>wet delicten</i> dalam Buku III</p> <p>7. Perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan di dalam KUHP</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
 Tgl. Terbit : ...  
 No. Revisi : ...  
 Hal : 7/66

							- Sikap dan perilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)		
4 dan 5	Mahasiswa dapat memahami sejarah dan legitimasi tindak pidana di luar KUHP.	Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan latar belakang adanya tindak pidana di luar KUHP 2. Menelaah legitimasi atau dasar adanya tindak pidana di luar KUHP 3. Memahami urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP 4. Perkembangan tindak pidana di luar KUHP 5. Memerinci peraturan	1. Latar belakang munculnya tindak pidana di Luar KUHP 2. Pasal 103 KUHP sebagai legitimasi adanya pengaturan tindak pidana di luar KUHP 3. Urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP 4. Perkembangan tindak pidana di luar KUHP 5. Peraturan perundang-undangan tindak	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab Model <i>Cooperative Learning</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan materi, mengerjakan latihan soal.	Kuis dan Diskusi	- Pro aktif - Ketepatan dalam : 1. menjelaskan Latar belakang munculnya tindak pidana di Luar KUHP 2. Pasal 103 KUHP sebagai legitimasi adanya pengaturan tindak pidana di luar KUHP. 3. Urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP. 4. Perkembangan tindak pidana di luar KUHP.	10%	Buku 1,2, 3



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
 Tgl. Terbit : ...  
 No. Revisi : ...  
 Hal : 8/66

		perundang-perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP.	pidana di luar KUHP				5. Peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP - Sikap dan perilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)		
6 dan 7	Mampu menguraikan asas yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP.	Mahasiswa dapat : 1. Memahami asas : - Legalitas - <i>Lex specialis derogate lege generalis</i> - <i>Lex superior derogate lege inferior</i> - <i>Lex posterior derogate lege priori</i> 2. Bentuk penyertaan/ <i>deelneming</i> dan percobaan/ <i>poging</i> dalam tindak pidana	1. Asas Legalitas, <i>Lex Specialis derogate lege generalis</i> , <i>Lex superior derogate lege inferior</i> , <i>lex posterior derogate lege inferior</i> 2. Penyertaan/ <i>deelneming</i> : - <i>Pleger</i> - <i>Doen pleger</i> - <i>Medeplger</i> - <i>Uitlokker</i> - <i>Medeplictinge</i>	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab Model <i>Cooperative Learning</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan menyiapkan suatu masalah atau kasus lalu diselesaikan secara berkelompok.	Kuis dan Diskusi	- Presentasi - Ketepatan menjelaskan : 1. Asas Legalitas, <i>Lex Specialis derogate lege generalis</i> , <i>Lex superior derogate lege inferior</i> , <i>lex posterior derogate lege inferior</i> . 2. Penyertaan/ <i>deelneming</i> : - <i>Pleger</i> - <i>Doen pleger</i>	10%	Buku 1,2,3



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	9/66

		<p>3. Pertanggungjawaban pidana</p> <p>4. Alasan penghapusan pidana</p> <p>5. Mendiferensiasikan kekhususan formil dan materiil dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem penjatuhan sanksi masing-masing bentuk <i>delneming</i></li> </ul> <p>Bentuk Percobaan/<i>poging</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur percobaan</li> <li>- Sistem penjatuhan sanksi</li> </ul> <p>3. Pertanggungjawaban Pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Actus Reus</i> / perbuatan</li> <li>- <i>Mens Real</i> pelaku</li> </ul> <p>4. Alasan Penghapusan Pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan Pembenaar</li> <li>- Alasan Pemaaf</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Medeplger</i></li> <li>- <i>Uitlokker</i></li> <li>- <i>Medeplictige</i></li> <li>- Sistem penjatuhan sanksi masing-masing bentuk <i>delneming</i></li> </ul> <p>3. Bentuk Percobaan/<i>poging</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur percobaan</li> <li>- Sistem penjatuhan sanksi</li> </ul> <p>4. Pertanggungjawaban Pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Actus Reus</i> / perbuatan</li> </ul>		
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
 Tgl. Terbit : ...  
 No. Revisi : ...  
 Hal : 10/66

			5. Penyimpangan formil dan materiil dalam tindak pidana di luar KUHP.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Mens Real</i> pelaku</li> </ul> 5. Alasan Penghapus Pidana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan Pembenaar</li> <li>- Alasan Pemaaf</li> </ul> 6. Penyimpangan formil dan materiil dalam tindak pidana di luar KUHP. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dan prilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi))</li> </ul>		
8	<b>UTS</b>								
9	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materiil (UU ITE)	Mahasiswa dapat : 1. Menelaah kebaruan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas	1. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Undang-Undang	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, <i>Small Group Discussion</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan membentuk kelompok untuk memilih bahan diskusi dan mempresentasikan.	Diskusi dan Kuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam diskusi</li> <li>- Ketepatan menjelaskan : 1. Perubahan Undang-Undang Nomor</li> </ul>	10%	Buku 1, UU ITE



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	11/66

		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Menguraikan penyimpangan materil UU ITE 3. Penyelesaian kasus UU ITE	Nomor 19 Tahun 2016 2. Diakuinya unsur informasi elektornik atau data elektronik sebagai alat bukti 3. Uraian kasus UU ITE				11 Tahun 2008 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 - Ketepatan menguraikan Diakuinya unsur informasi elektornik atau data elektronik sebagai alat bukti Ketepatan menguraikan kasus UU ITE - Sikap dan prilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)		
10 dan 11	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP.	Mahasiswa dapat : 1. Menguraikan unsur-unsur tindak pidana di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan indak Pidana Korupsi	1. Unsur-unsur delik sebagai tindak pidana di Luar KUHP 2. Proses peradilan tindak pidana di luar KUHP: Penyelidikan dan Penyidikan	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, <i>Small Group Discussion</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan menyimpulkan tugas yang diberikan dosen, mengerjakan latihan soal.	Diskusi	- Ketepatan menguraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi - Ketepatan menjelaskan penyimpangan terhadap hukum pidana formil dan materil	15 %	Buku 1, UU Tipikor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
 Tgl. Terbit : ...  
 No. Revisi : ...  
 Hal : 12/66

	(UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)	2. Menjelaskan penyimpangan terhadap hukum pidana formil dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. 3. Menguraikan proses peradilan tindak pidana di luar KUHP: Penyelidikan dan Penyidikan 4. Menguraikan penuntutan dan pemeriksaan hingga putusan di pengadilan 5. Menelaah sistem Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana di Luar KUHP 6. Memahami peran dan problematika KPK dalam	3. Proses peradilan tindak pidana korupsi 4. Penuntutan dan pemeriksaan hingga putusan di pengadilan 5. Pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi 6. Peran dan hambatan KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguraikan proses peradilan tindak pidana di luar KUHP: Penyelidikan dan Penyidikan</li> <li>- Menguraikan penuntutan dan pemeriksaan hingga putusan di pengadilan</li> <li>- Menelaah sistem Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana di Luar KUHP</li> <li>- Memahami peran dan problematika KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi</li> <li>- Sistematika makalah dan pendalaman materi tentang</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	13/66

		penyelesaian tindak pidana korupsi.					peradilan tindak pidana di Luar KUHP		
12	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang)	Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan tindak pidana pencucian uang 2. Menguraikan sejarah tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan beberapa negara lainnya. 3. Menguraikan hubungan tindak pidana pecucian uang dngan tindak pidana di Luar KUHP 4. Memahami penyelesaian tindak pidana	1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian uang 2. Sejarah dan sumber hukum tindak pidana pencucian uang 3. Hubungan tindak pidana pecucian uang dengan tindak pidana korupsi 4. Penyelesaian tindak pidana pencucian uang: - Peran PPATK dan Bank 5. Penanganan tindak pidana pencuciaan uang dalam pemulihan	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, Presentasi Model <i>Cooperative Learning</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan mengerjakan latihan soal.	Diskusi dan makalah	- Ketepatan menjelaskan tindak pidana pencucian uang - Ketepatan menguraikan sejarah tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan beberapa negara lainnya - Ketepatan memahami Penyelesaian tindak pidana pencucian uang: - Peran PPATK dan Bank - Ketepatan menguraikan tindak pidana	10%	Buku 1 dan UU TPPU



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	14/66

		<p>pencucian uang</p> <p>5. Menguraikan tindak pidana pencucian uang dalam pemulihan aset di pasar modal</p>	<p>aset di pasar modal.</p>				<p>pencucian ang dalam pemulihan aset di pasar modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dan perilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)</li> </ul>		
13	<p>Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. ( Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang U Narkotika)</p>	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menelaah unsur tindak pidana dalam Undang-Undang 35 Taun 2009 tentang Narkotika</li> <li>2. Memahami Pasal ambigu dalam Pasal 112 dan 127 UU</li> <li>3. Memahami jenis teknik penyidikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur tindak pidana dan penggolongan narkotika.</li> <li>2. Penyalahguna dan pengedar narkotika</li> <li>3. Penyidikan penyerahan diawasi Penyidikan pembelian terselubung</li> </ol>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan menelaah unsur tindak pidana dan penggolongan narkotika.</li> <li>- Ketepatan menjelaskan pasal 112 dan 127 dalam Undang-Undang Narkotika</li> <li>- Penyidikan penyerahan diawasi dan Penyidikan pembelian terselubung</li> </ul>	10%	
14	<p>Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil</p>	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami pengertian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbandingan pengertian terorisme dan pengertiannya</li> </ol>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan menjelaskan pengertian terorisme dan</li> </ul>	10%	Buku 1, UU Anti Terorisme



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	15/66

	<p>dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Anti Terorisme )</p>	<p>teorisme dari beberapa negara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perbandingan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anti Terorisme</li> <li>3. Menguraikan sejarah UU Anti Terorisme</li> <li>4. Memahami penyimpangan pemberlakuan UU Terorisme dikaitkan</li> <li>5. Menelaah rumusan samar dalam unsur tindak pidana terorisme</li> <li>6. Ketentuan Khusus dalam UU Teorisme.</li> </ol>	<p>dari beberapa negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perbandingan UU Pembererantasan Tindak Pidana Teoriisme dengan UU Anti Terorisme :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi terorisme</li> <li>- Organisasi teroris</li> <li>- Pelatihan militer</li> <li>- Penghasutan</li> <li>- Pelibatan anak</li> <li>- Waktu penahanan</li> <li>- Penangkapan</li> <li>- Penyadapan</li> <li>- Hak korban</li> <li>- Peran BNPT</li> </ul> </li> <li>3. Sejarah UU Anti Teroirsme : - Peraturan Pemerintah Pengganti</li> </ol>				<p>pengertian beberapa negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan membandingkan UU Anti terrisme</li> <li>- Ketepatan menguraikan sejarah UU Anti Terorisme</li> <li>- Ketepatan menelaah rumusan samar dalm UU Anti Terorisme</li> <li>- Ketepatan menguraikan penyimpangan formil dan materil</li> <li>- Sikap dan perilaku (kontribusi materi)</li> </ul>		
--	---	--	---	--	--	--	---	--	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 16/66

			<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002</p> <p>4. Penyimpangan pemberlakuan UU Anti Terorisme ikaitkan dengan asas legalitas dan asas non retroaktif</p> <p>5. Rumusan samar dalam unsur tindak pidana terorisme</p> <p>7. Ketentuan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penetapan rumusan bukti permulaan</li><li>- Durasi penangkapan</li><li>- Waktu penahanan</li><li>- Perluasan alat bukti</li><li>- Adanya kerja sama internasional</li></ul>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	17/66

15	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)	Mahasiswa dapat : 1. Memahami tindak pidana pemilihan umum 2. Menelaah acara pidana dalam tindak pidana pemilu 3. Menguraikan kekhususan penyelesaian tindak pidana pemilihan umum 4. Menelaah bentuk percobaan/ <i>poging</i> dan penyertaan/ <i>delneming</i>	1. Unsur tindak pidana pemilihan umum 2. Acara pidana dalam tindak pidana pemilu 3. Kekhususan penyelesaian tindak pidana pemilu : - Peran Sentra Gakkumdu dan Kepolisian 4. Keterkaitan percobaan/ <i>poging</i> dengan penyertaan / <i>delneming</i>				- Ketepatan menjelaskan unsur tindak pidana pemilihan umum - Ketepatan menelaah acara pidana tindak pidana pemilihan umum - Ketepatan menelaah bentuk <i>poging</i> dan <i>delneming</i> dalam UU Pemilu	15%	Buku 1, UU Pemilu
16	<b>UAS</b>								

**Catatan:**

*Pengalaman belajar yang dirumuskan akan terkait dengan kegiatan belajar, penugasan, diskusi, dan atau presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan inti pada RPP. Mohon kegiatan inti di sinkronkan dengan pengalaman belajar mahasiswa tersebut.*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	18/66

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Syukri Hidayatullah, S.H., M.H.  
NIP 198202062008121002

Samarinda, April 2019

Dosen Pengampu,

Orin Gusta Andini, S.H., M.H.  
NIP 199211042018032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	19/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak pidana di luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015265
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 1/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan menganalisa secara komprehensif peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana di Luar KUHP
Kemampuan Khusus Indikator	: Mahasiswa dapat menguraikan pengertian tindak pidana di luar KUHP. : 1. Menjelaskan istilah dan pengertian tindak pidana. 2. Menjelaskan subjek hukum tindak pidana



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 20/66

Referensi

3. Menjelaskan pengertian tindak pidana di luar KUHP menurut para ahli.
- :
1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta
  2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers: Jakarta
  3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tata tertib umum perkuliahan dan membahas kontrak kuliah. 3. Menjelaskan CPL mata kuliah, KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
2	Inti	1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Kourpsi LCD dan Laptop	Sikap/perilaku



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 21/66

		<ol style="list-style-type: none"><li>Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li><li>Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li></ol>			White board, Spidol, Penghapus,	
3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li><li>Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya</li><li>Doa Penutup</li></ol>	Ceramah	40 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus, LCD, Laptop, Kertas Kerja	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	22/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak Pidana di luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 2/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP di Indonesia.
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa dapat menguraikan pengertian tindak pidana di luar KUHP.
Indikator	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendiferensiasikan jenis-jenis tindak pidana.</li><li>2. Menguraikan sistematika KUHP.</li></ol>
Referensi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta</li><li>2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta</li><li>3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta</li><li>4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li><li>5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li></ol>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	23/66

6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membimbing Doa</li> <li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu lalu</li> <li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis</li> </ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP, LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li> <li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li> <li>3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li> </ol>	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li> <li>2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya</li> <li>3. Doa Penutup</li> </ol>	Ceramah	40 menit	Buku, LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus, LCD	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	24/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak Pidana Di Luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015265
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 3/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP di Indonesia.
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa dapat menguraikan pengertian tindak pidana di luar KUHP.
Indikator	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami kualifikasi kejahatan dan pelanggaran</li><li>2. Menelaah perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan tindak pidana di dalam KUHP.</li></ol>
Referensi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta</li><li>2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta</li><li>3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta</li><li>4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li></ol>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 25/66

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu lalu 3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP, LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
2	Inti	1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum 3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa.	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Korupsi LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran	Ceramah	40 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	26/66

		2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup			LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus, LCD, laptopLaptop, Kertas Kerja	
--	--	---	--	--	---	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	27/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak pidana di luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 4/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP di Indonesia
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa dapat memahami sejarah dan legitimasi tindak pidana di luar KUHP.
Indikator	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan latar belakang adanya tindak pidana di luar KUHP</li><li>2. Menelaah legitimasi atau dasar adanya tindak pidana di luar KUHP</li><li>3. Memahami urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP.</li></ol>
Referensi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta</li><li>2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta</li><li>3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta</li><li>4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li></ol>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 28/66

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membimbing Doa</li><li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu yang lalu</li><li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.</li></ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li><li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li><li>3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li></ol>	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	29/66

3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li><li>2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya</li><li>3. Doa Penutup</li></ol>	Ceramah	40 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP, LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus, LCD, Laptop,	Tes/nontes.
---	-------	---	---------	----------	---	-------------



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	30/66

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak pidana di luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 5/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP di Indonesia
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa dapat memahami sejarah dan legitimasi tindak pidana di luar KUHP.
Indikator	: 1. Perkembangan tindak pidana di luar KUHP 2. Memerinci peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP.
Referensi	: 1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta 2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta 3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 31/66

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu lalu 3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
2	Inti	1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum 3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	32/66

3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li><li>2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya</li><li>3. Doa Penutup</li></ol>	Ceramah	40 menit	Buku Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD, Laptop White board, Spidol, Penghapus, LCD, Kertas Kerja	Tes/nontes.
---	-------	---	---------	----------	---	-------------



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	33/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak pidana di luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015218
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 6/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP.
Kemampuan Khusus Indikator	: Mampu menguraikan asas yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP. : 1. Memahami asas Legalitas, <i>Lex specialis derogate lege generalis, Lex superior derogate lege inferior, Lex posterior derogate lege priori</i> 2. Bentuk penyertaan/ <i>deelneming</i> dan percobaan/ <i>poging</i> dalam tindak pidana 3. Pertanggungjawaban pidana.
Referensi	: 1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta 2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta 3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 34/66

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membimbing Doa</li><li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu lalu</li><li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.</li></ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li><li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li><li>3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li></ol>	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	35/66

3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li><li>2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya</li><li>3. Doa Penutup</li></ol>	Ceramah	40 menit	Buku Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD, Laptop White board, Penghapus, LCD, Kertas Kerja	Tes/nontes.
---	-------	---	---------	----------	--	-------------



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	36/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak Pidana di Luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 7/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP.
Kemampuan Khusus Indikator	: Mampu menguraikan asas yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP. : 1. Alasan penghapusan pidana 2. Mendiferensiasikan kekhususan formil dan materiil dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP
Referensi	: 1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta 2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta 3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 37/66

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membimbing Doa</li><li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu yang lalu</li><li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.</li></ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP, LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li><li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li><li>3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li></ol>	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li></ol>	Ceramah	40 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP,	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	38/66

		2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya			LCD, Laptop	
		3. Doa Penutup			White board, Spidol, Penghapus,	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	39/66

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum  
Matakuliah : Tindak Pidana Di Luar KUHP  
Kode Matakuliah : 08015264  
SKS : 2 (dua) SKS  
Pertemuan ke/Waktu : 8/100 menit  
Deskripsi Mata Kuliah : Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.  
Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP.  
Kemampuan Khusus : Mahasiswa mampu menjawab soal dengan baik dan benar disesuaikan dengan indikator pertemuan sebelumnya.  
Indikator : **UTS**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 40/66

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tata tertib umum UTS	Tertulis	5 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kerja	Sikap/perilaku
2	Inti	Pelaksanaan UTS	Tertulis	60 menit	Buku tentang Tindak Pidana di Luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kkerja	Sikap/perilaku
3	Akhir	1. Mereview hasil UTS 2. Doa Penutup	Lisan	35 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kerja	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	41/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak Pidana Di Luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 9/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di Luar KUHP.
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil (UU ITE)
Indikator	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menelaah kebaruan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li><li>2. Menguraikan penyimpangan materil UU ITE</li><li>3. Penyelesaian kasus UU ITE</li></ol>
Referensi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta</li><li>2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta</li><li>3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta</li><li>4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li></ol>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	42/66

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membimbing Doa</li> <li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu yang lalu</li> <li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.</li> </ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li> <li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li> <li>3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li> </ol>	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li> </ol>	Ceramah	40 menit	Buku Tindak Pidana Di Luar KUHP	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	43/66

		2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup			LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus, LCD,	
--	--	---	--	--	---	--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	44/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak pidana di luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 10/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di Luar KUHP. : Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
Indikator	: 1. Menguraikan unsur-unsur tindak pidana di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi 2. Menjelaskan penyimpangan terhadap hukum pidana formil dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. 3. Menguraikan proses peradilan tindak pidana di luar KUHP: Penyelidikan dan Penyidikan
Referensi	: 1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta 2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 45/66

3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membimbing Doa</li><li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu yang lalu</li><li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.</li></ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li><li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li><li>3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li></ol>	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	46/66

3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li><li>2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya</li><li>3. Doa Penutup</li></ol>	Ceramah	40 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus, LCD,	Tes/nontes.
---	-------	---	---------	----------	--	-------------



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	47/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak Pidana Di Luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 11/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di Luar KUHP. : Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
Indikator	: 1. Menguraikan penuntutan dan pemeriksaan hingga putusan di pengadilan 2. Menelaah sistem Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana di Luar KUHP 3. Memahami peran dan problematika KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi
Referensi	: 1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta 2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta 3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	48/66

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membimbing Doa</li> <li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu yang lalu</li> <li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.</li> </ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kerja	Sikap/perilaku
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li> <li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li> <li>3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li> </ol>	Diskusi, ceramah	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP, LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li> </ol>	Ceramah	40 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	49/66

		2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya			Soal Tertulis dan Kertas Kerja	
		3. Doa Penutup				



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	50/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak pidana di luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 12/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP.
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang)
Indikator	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan tindak pidana pencucian uang</li><li>2. Menguraikan sejarah tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan beberapa negara lainnya.</li><li>3. Menguraikan hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana di Luar KUHP</li><li>4. Memahami penyelesaian tindak pidana pencucian uang</li><li>5. Menguraikan tindak pidana pencucian uang dalam pemulihan asset di pasar modal</li></ol>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	51/66

Referensi :

1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta
2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers: Jakarta
3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membimbing Doa</li><li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu yang lalu.</li><li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.</li></ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kerja	Sikap/perilaku
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li><li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li></ol>	Diskusi, ceramah	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 52/66

		3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa				
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup	Ceramah	40 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kerja	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	53/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak Pidana Di Luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 13/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP..
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. ( Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang UU Narkotika)
Indikator	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menelaah unsur tindak pidana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li><li>2. Memahami Pasal ambigu dalam Pasal 112 dan 127 UU</li><li>3. Memahami jenis teknik penyidikan.</li></ol>
Referensi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta</li><li>2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers; Jakarta</li></ol>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 54/66

3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membimbing Doa</li><li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu yang lalu.</li><li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis</li></ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kerja	Sikap/perilaku



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 55/66

2	Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li><li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li><li>3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li></ol>	Diskusi, ceramah	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP, LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	Sikap/perilaku
3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li><li>2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya</li><li>3. Doa Penutup</li></ol>	Ceramah	40 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kerja	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	56/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum  
Matakuliah : Tindak Pidana Di Luar KUHP  
Kode Matakuliah : 08015264  
SKS : 2 (dua) SKS  
Pertemuan ke/Waktu : 14/100 menit  
Deskripsi Mata Kuliah : Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.  
Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP..



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	57/66

Kemampuan Khusus : Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Anti Terorisme )

- Indikator :
1. Memahami pengertian teorisme dari beberapa negara
  2. Perbandingan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anti Terorisme
  3. Menguraikan sejarah UU Anti Terorisme
  4. Memahami penyimpangan pemberlakuan UU Terorisme dikaitkan
  5. Menelaah rumusan samar dalam unsur tindak pidana terorisme
  6. Ketentuan Khusus dalam UU Teorisme.

- Referensi :
1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta
  2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers: Jakarta
  3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP	Sikap/perilaku



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 58/66

		<ol style="list-style-type: none"><li>Menjelaskan materi perkuliahan minggu yang lalu.</li><li>Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis</li></ol>			LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus,	
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li><li>Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li><li>Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li></ol>	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP, LCD dan Laptop White board, Pointer, Spidol, Penghapus.	Sikap/perilaku
3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li><li>Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya</li><li>Doa Penutup</li></ol>	Ceramah	40 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP, LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus, LCD, Laptop, Kertas Kerja	Tes/nontes.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	59/66

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Tindak pidana di luar KUHP
Kode Matakuliah	: 08015264
SKS	: 2 (dua) SKS
Pertemuan ke/Waktu	: 15/100 menit
Deskripsi Mata Kuliah	: Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP.
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).
Indikator	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tindak pidana pemilihan umum</li><li>2. Menelaah acara pidana dalam tindak pidana pemilu</li><li>3. Menguraikan kekhususan penyelesaian tindak pidana pemilihan umum</li><li>4. Menelaah bentuk percobaan/ <i>poging</i> dan penyertaan/ <i>delneming</i></li></ol>
Referensi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta</li></ol>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
 JURUSAN ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	60/66

2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers:Jakarta
3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membimbing Doa</li> <li>2. Menjelaskan materi perkuliahan minggu yang lalu.</li> <li>3. Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis</li> </ol>	Ceramah	10 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus	Sikap/perilaku
2	Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan materi sesuai dengan indikator</li> <li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum</li> <li>3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa</li> </ol>	Ceramah, diskusi	50 menit	Buku tentang Tindak Pidana Di Luar KUHP, LCD dan Laptop White board, Pointer, Spidol, Penghapus.	Sikap/perilaku



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	61/66

3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran</li><li>2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya</li><li>3. Doa Penutup</li></ol>	Ceramah	40 menit	Buku Tindak Pidana Di Luar KUHP LCD dan Laptop White board, Spidol, Penghapus	Tes/nontes.
---	-------	---	---------	----------	--	-------------



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.	:	...
Tgl. Terbit	:	...
No. Revisi	:	...
Hal	:	62/66

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum /S-1 Ilmu Hukum  
Matakuliah : Tindak pidana di luar KUHP  
Kode Matakuliah : 08015264  
SKS : 2 (dua) SKS  
Pertemuan ke/Waktu : 16/100 menit  
Deskripsi Mata Kuliah : Tindak pidana di luar KUHP termasuk kedalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti di Luar KUHP di masyarakat.  
Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP.  
Kemampuan Khusus : Mahasiswa mampu menjawab soal dengan baik dan benar disesuaikan dengan indikator pertemuan sebelumnya untuk menilai capaian mata pembelajaran mata kuliah.  
Indikator : **UAS**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
JURUSAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok. : ...  
Tgl. Terbit : ...  
No. Revisi : ...  
Hal : 63/66

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tata tertib umum UAS	Tertulis	5 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kerja	Sikap/perilaku
2	Inti	Pelaksanaan UTS	Tertulis	60 menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kkerja	Sikap/perilaku
3	Akhir	Doa Penutup	Lisan	Menit	Buku tentang Tindak pidana di luar KUHP Soal Tertulis dan Kertas Kerja	Tes/nontes.

## 1. Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E)

**Capaian Pembelajaran MK** : Mahasiswa mampu menganalisis kasus tindak pidana kourpsi di tingkat lokal maupun nasional.

Mg Ke	Kemampuan khusus (KK)	Bahan Kajian (Materi Pokok)	Butir Soal Evaluasi					Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif			Psikomotor	Afektif		
			C1	C2	C3	P1	A1		
8	Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana di Luar KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian tindak pidana di luar KUHP</li> <li>2. Sejarah munculnya tindak pidana di luar KUHP dan legitimasi terbentuknya tindak pidana di luar KUHP</li> <li>3. Mengorganisasikan berbagai peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana di Luar KUHP</li> <li>4. Menguraikan pertanggungjawaban pidana dan bentuk <i>poging</i> dan <i>delneming</i></li> <li>5. Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana di Luar KUHP</li> </ol>	5	5	5	5	5	Tes Tertulis/ <i>Written Test</i>	40%
16	Mahasiswa dapat menjawab soal UAS sesuai dengan materi yang telah diberikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakuan data atau informasi elektronik sebagai alat bukti</li> <li>2. Pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor</li> <li>3. Penyelesaian dalam UU Narkotika yang berkaitan dengan teknik penyelidikan</li> <li>4. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi</li> </ol>				1	1	Tes Tertulis/ <i>Written Test</i>	50%

Mg Ke	Kemampuan khusus (KK)	Bahan Kajian (Materi Pokok)	Butir Soal Evaluasi					Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif			Psikomotor	Afektif		
			C1	C2	C3	P1	A1		
		5. Bentuk deelneming dan poging dalam kasus tindak pidana pemilu							
	Afektif								10%
Jumlah	Butir Soal		5	5	5	6	6		
	Persentase		50%			25%	25%		100%

## 2. Contoh Soal Tes Uraian

**Mata Kuliah:** Tindak pidana di luar KUHP

1. Uraikan pemahaman anda tentang tindak pidana di luar KUHP?
2. Uraikan pemahaman anda tentang pertanggungjawaban pidana?
3. Jelaskan tentang asas legalias, lex specialis derogate lege genaril, lex superior derogate lege inferiori, Lex posterior derogate lege priori ?
4. Jelaskan pemahaman anda terkait sejarah dan legitimasi tindak pidana di luar KUHP?
5. Uraikan pemahaman anda tentang teknik penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
6. Uraikan satu contoh kasus beserta pertanggungjawaban pidananya yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP?